



Efektivitas Tata Kelola Kolaboratif Multi Sektor dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone

The Effectiveness of Multi-Sector Collaborative Governance in Accelerating Stunting Reduction in Bone Regency

Anisa Fitri^{1*}, Sulmiah², Nina Agustina³, Widyawati⁴, Dewi Sulfa Saguni⁵

^{1,2,3} Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Makassar, Indonesia.

^{4,5} Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia.

*Author correspondence: anisa.fitri@unm.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted:

2025-11-07

Revised:

2025-11-20

Accepted:

2025-11-20

Published:

2025-12-01

Keywords: governance; collaborative; multi-sector; stunting; bone

Kata kunci: tata kelola; kolaboratif; multi-sektor; stunting; bone

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of multi-sector collaborative governance in accelerating stunting reduction in Bone Regency. This research departs from the still high prevalence of stunting which has an impact on the quality of human resources and regional economic productivity. The research approach used is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observations, and documentation of stakeholders. Data analysis uses the Miles, Huberman, and Saldana models through the stages of reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that cross-sector collaboration in reducing stunting in Bone Regency has been quite effective from the five dimensions of collaboration effectiveness according to Roberts (2016), namely common goals, mutuality, enabling environment, trust, and certain personal characteristics. This collaboration has contributed to reducing the prevalence of stunting from 25.3% in 2023 to 21.9% in 2024 based on e-PPGBM data. The conclusion of this study confirms that adaptive and evidence-based collaborative governance is effective in accelerating the achievement of stunting reduction targets in Bone Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas tata kelola kolaboratif multi sektor dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone. Penelitian ini berangkat dari masih tingginya prevalensi stunting yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemangku kepentingan. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam penurunan stunting di Kabupaten Bone telah berjalan cukup efektif ditinjau dari lima dimensi efektivitas kolaborasi menurut Roberts (2016), yaitu tujuan bersama, mutualitas, lingkungan yang memungkinkan, kepercayaan, dan karakteristik pribadi tertentu. Kolaborasi tersebut berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting dari 25,3% pada tahun 2023 menjadi 21,9% pada tahun 2024 berdasarkan data e-PPGBM. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif yang adaptif dan berdasarkan bukti, efektif mempercepat pencapaian target penurunan stunting di Kabupaten Bone.

Pendahuluan

Stunting atau balita pendek masih menjadi salah satu tantangan gizi kronis terbesar di dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif, kemampuan belajar, dan produktivitas ekonomi di masa depan (UNICEF & WHO, 2017). Dampak jangka panjang stunting bersifat multidimensi karena berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, daya saing bangsa, dan pertumbuhan ekonomi nasional (Research Institute (IFPRI), 2016); (Bappenas, 2020). Oleh karena itu, penurunan stunting merupakan isu strategis dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan dan menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional.

Secara nasional, meskipun prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan tren penurunan (dari 37,2% pada 2013 menjadi 30,8% pada 2018), angka ini masih berada di atas ambang batas 20% yang ditetapkan WHO sebagai kategori masalah gizi kronis berat. Upaya pemerintah Indonesia diarahkan melalui pendekatan multi-sektor dengan mengintegrasikan intervensi spesifik (jangka pendek) dan intervensi sensitif (jangka panjang) yang dikoordinasikan secara lintas sektor (Bappenas, 2020).

Upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka stunting diarahkan melalui pendekatan *multi-sektor* sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan target *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yakni mengakhiri segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 (Bappenas, 2020); (Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, 2023). Kebijakan ini menekankan sinergi antar pemangku kepentingan (multi-stakeholders) dengan integrasi data dan program dari tingkat pusat hingga desa (BKKBN, 2021). Faktor penyebab stunting yang kompleks mulai dari kurangnya asupan gizi, sanitasi buruk, hingga faktor sosial dan ekonomi keluarga memerlukan intervensi lintas sektor yang terkoordinasi (Prendergast & Humphrey, 2014). Dua pendekatan yang digunakan adalah intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik yaitu intervensi jangka pendek dan berfokus pada kesehatan, gizi ibu, serta anak. Intervensi sensitif adalah intervensi jangka panjang yang meliputi ketahanan pangan, air bersih, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat) (Bappenas, 2020);(BKKBN, 2023) .

Secara regional, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki prevalensi stunting 30,1% dan menempati posisi ke-13 dari 34 provinsi (Bappenas, 2020). Kabupaten Bone merupakan salah satu lokus prioritas nasional sejak tahun 2019, dengan prevalensi 40,1% pada 2018 yang menurun menjadi 33,0% pada 2020 (Bone.go.id, 2021). Meski mengalami tren penurunan, angka tersebut masih melebihi ambang batas WHO. Pemerintah Kabupaten Bone menempatkan isu ini sebagai prioritas utama pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam visi "Bone Sehat, Cerdas, dan Sejahtera" (RPJMD Bone, 2018-2023). Langkah konkret dilakukan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting, serta Keputusan Bupati Nomor 188 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Namun, efektivitas kolaborasi multi-sektor ini masih menghadapi tantangan implementasi di lapangan. Tantangan tersebut meliputi lemahnya komunikasi, rendahnya partisipasi sektor swasta, dan belum optimalnya kepercayaan (trust) dan hubungan timbal balik (mutuality) antar aktor. Padahal, elemen trust dan mutuality merupakan faktor esensial dalam keberhasilan tata kelola kolaboratif (Roberts et al., 2016). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa kegiatan pencegahan stunting masih berpotensi berjalan secara sektoral, meskipun kerangka kebijakan sudah terintegrasi. Berdasarkan gap implementasi tersebut, dan didukung oleh data terbaru yang menunjukkan penurunan signifikan stunting di Kabupaten Bone dari 25,3% pada 2023 menjadi 21,9% pada 2024 (Bone.id, 2025), maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian: Sejauh mana efektivitas tata kelola pemerintahan dalam kolaborasi multi-sektor berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone?

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi empiris terhadap praktik collaborative governance di tingkat daerah, yang melampaui deskripsi program konvensional. Nilai kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penerapan kerangka Teori Efektivitas Kolaborasi Debbie Roberts (2016) sebagai alat analisis evaluatif pada konteks pemerintahan daerah Indonesia. Sebagian besar penelitian stunting fokus pada dampak kebijakan atau faktor determinan kesehatan; penelitian ini mengisi kekosongan dengan menganalisis secara mendalam dimensi proses tata kelola (seperti trust dan mutuality) yang menjadi kunci keberhasilan intervensi lintas sektor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mengembangkan model tata kelola kolaboratif yang efektif bagi percepatan penurunan stunting.

Kajian Literatur

Dalam mengatasi masalah stunting, kolaborasi multi-sektor menjadi pendekatan penting yang banyak diadopsi oleh berbagai negara, terutama di negara berkembang. Stunting, yang merupakan masalah gizi kronis yang mempengaruhi balita, dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat penurunan

stunting. Kajian ini merujuk pada studi yang dilakukan di Kabupaten Bone, yang mengadopsi model Collaborative Governance dalam mengatasi masalah stunting.

Konsep Collaborative Governance

Collaborative governance mengacu pada pendekatan yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mengambil keputusan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Ansell dan Gash menjelaskan bahwa dalam kerangka governance, interaksi antar pemangku kepentingan sangat penting, terutama dalam mengatasi masalah yang kompleks. Dalam konteks stunting, kolaborasi lintas sektor dibutuhkan untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan sektor lainnya yang saling terkait. Konsep Collaborative Governance menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan yang kolektif, dan bukan hanya tergantung pada kekuasaan pemerintah semata (Emerson et al., 2012).

Dimensi-Dimensi Keberhasilan Kolaborasi

Menurut (Roberts et al., 2016), keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada tujuan bersama tetapi juga pada faktor-faktor seperti mutualitas, kepercayaan, dan lingkungan yang memungkinkan. Di Kabupaten Bone, kolaborasi antara sektor kesehatan, ketahanan pangan, dan sosial menunjukkan adanya peningkatan mutualitas dan saling ketergantungan antar aktor. Goddard (2006) mengemukakan bahwa mutualitas sangat penting dalam kolaborasi, karena tanpa adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, kolaborasi akan sulit tercapai.

Roberts et al. (2016) juga mengemukakan lima dimensi yang membentuk efektivitas kolaborasi, yaitu: tujuan bersama, mutualitas, lingkungan yang memungkinkan, kepercayaan, dan karakteristik pribadi tertentu, yang kesemuanya berperan penting dalam keberhasilan kolaborasi multi-sektor dalam penurunan stunting. Kepercayaan antar aktor juga menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan bersama. Penelitian di Kabupaten Bone mengidentifikasi bahwa meskipun awalnya kepercayaan antar sektor masih rendah, seiring dengan pelaksanaan forum koordinasi yang rutin, kepercayaan mulai terbentuk, yang pada gilirannya memperkuat efektivitas kolaborasi (Emerson et al., 2012).

Konsep Stunting

Stunting merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan multi-sektor yang terkoordinasi. (Prendergast & Humphrey, 2014) menegaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan stunting, seperti kekurangan gizi, sanitasi yang buruk, dan faktor sosial-ekonomi, hanya bisa ditangani secara efektif melalui kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, serta sektor

lainnya. Bappenas (2020) mengungkapkan bahwa keberhasilan penurunan stunting dapat dicapai melalui sinergi antar pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, serta masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan melalui kolaborasi multi sektor dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone. Pendekatan ini membantu peneliti menelaah makna, interaksi, dan pengalaman para pemangku kepentingan yang berperan dalam proses kolaborasi (John W Chraswell, n.d.) ; (Moleong & Lexy J, 2019). Jenis penelitian ini bersifat studi kasus, dengan fokus pada satu unit analisis, yaitu tata kelola kolaboratif dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap informan yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam kebijakan percepatan penurunan stunting. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, antara lain Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting, Keputusan Bupati Nomor 188 Tahun 2022 tentang Pembentukan TPPS (Keputusan Bupati Bone, 2022), laporan Aksi. Sumber-sumber ini berfungsi untuk memperkuat hasil temuan lapangan dan memastikan keabsahan melalui triangulasi data. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model (Miles et al., 2014) yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan terus diverifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik guna menjaga validitas hasil penelitian (Moleong & Lexy, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Tujuan Umum (Common Purpose)

Konsep *common purpose* dalam teori efektivitas kolaborasi menurut (Roberts et al., 2016) menekankan pentingnya kesamaan visi dan tujuan bersama yang menjadi landasan terbentuknya kolaborasi lintas sektor. Dalam konteks penurunan stunting, *common purpose* bukan hanya berupa tujuan administratif semata, melainkan juga cerminan komitmen moral dan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup generasi masa depan. Di Kabupaten Bone, tujuan umum tersebut terformulasikan dalam tekad "Bone Bebas Stunting", yang menjadi payung besar seluruh kegiatan lintas sektor.

Berdasarkan hasil penelitian, terbentuknya kesamaan tujuan antara berbagai aktor dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Bone merupakan hasil dari proses panjang penyamaan persepsi antara pemerintah, tenaga kesehatan, sosial, dan organisasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa "*semua program konvergensi diarahkan arahkan pada satu titik, yaitu bagaimana seluruh OPD bekerja dengan satu tujuan: anak Bone harus bebas stunting.*" Visi bersama ini sejalan dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penurunan

Stunting serta Surat Keputusan Bupati Nomor 188 Tahun 2022 tentang Pembentukan TPPS.

Dalam pelaksanaannya, *common purpose* diimplementasikan melalui integrasi perencanaan program antar sektor. Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan pangan, BKKBN serta dinas lainnya secara rutin melakukan forum koordinasi bersama untuk menyelaraskan intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik seperti pemantauan status gizi, pemberian tablet tambah darah, dan imunisasi dilakukan beriringan dengan intervensi sensitif seperti penyediaan sanitasi, peningkatan ketahanan pangan keluarga, dan edukasi parenting. Sinergi ini menunjukkan bahwa setiap pihak memahaminya kontribusinya terhadap pencapaian tujuan bersama (Bappenas, 2020; Kemenkes, 2023).

Selain itu, pendekatan berbasis desa menjadi kunci utama penyatuan tujuan. Melalui musyawarah desa konvergensi, pemerintah desa, kader Posyandu, PKK, dan tokoh masyarakat diajak untuk menyusun rencana aksi pencegahan stunting yang selaras dengan kebijakan kabupaten. Hal ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat kabupaten, tetapi juga oleh pemahaman dan partisipasi di tingkat akar rumput (Emerson et al., 2012)

Data terbaru dari *AKSI 7 Pengukuran dan Publikasi Stunting* menunjukkan hasil konkret dari kesamaan arah kebijakan tersebut. Berikut ini tren penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Bone:

Tabel 1. Tren Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten Bone Tahun 2023-2024

Tahun	Prevalensi Stunting (%)
2023	25,3
2024	21,9

Sumber: e-PPGBM 2023-2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sejak penerapan kebijakan kolaboratif dan pembentukan TPPS, prevalensi stunting di Kabupaten Bone menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 25,3% pada 2023 menjadi 21,9% pada 2024. Penurunan ini menggambarkan efektivitas kesepahaman tujuan lintas sektor. Seluruh pemangku kepentingan tidak hanya bekerja berdasarkan mandat institusi, tetapi juga berdasarkan kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab sosial bersama.

Dengan demikian, *common purpose* di Kabupaten Bone telah berfungsi sebagai elemen kunci dalam membangun keselarasan antar sektor. (Andonova & Faul, 2022) menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi hanya dapat terjadi ketika semua pihak memiliki pandangan yang sama tentang hasil yang ingin dicapai, dan tidak sekadar berfokus pada peran masing-masing. Dalam konteks ini, Pemerintah Bone bertekad mewujudkan "Bone Bebas Stunting" bukan sekadar slogan kebijakan, tetapi menjadi simbol komitmen bersama seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan anak-anak Bone.

Mutualitas (Mutuality)

Mutualitas dalam teori Debbie Roberts (2016) menjelaskan adanya hubungan timbal balik antar aktor kolaborasi, di mana setiap pihak tidak hanya berkontribusi tetapi juga memperoleh manfaat dari hubungan yang terjalin. Dalam konteks tata kelola kolaboratif untuk penurunan stunting di Kabupaten Bone, mutualitas terwujud melalui mekanisme kerja sama lintas sektor yang saling memperkuat antara pemerintah daerah, perangkat desa, lembaga non pemerintah, dan masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan timbal balik ini tercermin dalam pelaksanaan program intervensi gizi spesifik dan sensitif. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan menyediakan data dan dukungan teknis dalam bentuk pelatihan tenaga gizi, sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) berperan memperkuat kelembagaan di tingkat desa agar intervensi berjalan efektif. Pemerintah desa kemudian mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung kegiatan posyandu, perbaikan sanitasi, dan pengadaan bahan pangan bergizi. Di sisi lain, kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga dan partisipasi aktif mempercepat capaian konvergensi program. Hubungan saling bergantung ini menggambarkan *mutual benefit* yang menjadi inti konsep mutualitas (Ansell & Gash, 2008)

Secara kelembagaan, forum koordinasi TPPS menjadi wadah paling nyata dari praktik mutualitas. Setiap pertemuan bulanan TPPS tidak hanya berfungsi sebagai forum pelaporan, tetapi juga sebagai arena pertukaran gagasan dan solusi lintas sektor. Misalnya, Dinas Pertanian mendukung penyediaan bibit sayuran untuk program "Pekarangan Pangan Lestari," sedangkan Dinas Pendidikan mengintegrasikan edukasi gizi dalam kegiatan sekolah. Dalam forum tersebut, semua sektor memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan kendala dan inovasi.

Mutualitas juga berkontribusi langsung terhadap percepatan penurunan prevalensi stunting. Berdasarkan data *e-PPGBM 2024*, desa-desa dengan tingkat partisipasi kolaboratif tinggi, seperti Desa Cina dan Desa Tibojong, menunjukkan penurunan prevalensi stunting hingga 6% dalam dua tahun terakhir lebih cepat dibandingkan desa yang intervensinya masih bersifat sektoral. Data ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor tidak hanya meningkatkan efisiensi sumber daya, tetapi juga menghasilkan efek sinergis yang nyata terhadap capaian pembangunan kesehatan masyarakat.

Roberts et al. (2016) menegaskan bahwa keberlanjutan kolaborasi hanya akan terjaga apabila setiap pihak merasakan manfaat nyata dari hubungan kerja sama. Dalam konteks Kabupaten Bone, manfaat tersebut bukan hanya berupa hasil penurunan angka stunting, tetapi juga meningkatnya kapasitas kelembagaan, kemandirian desa dalam perencanaan berbasis data, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi anak. Dengan demikian, mutualitas telah berfungsi sebagai fondasi sosial yang memperkuat efektivitas tata kelola kolaboratif dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone.

Lingkungan yang Memungkinkan (Enabling Environment)

Lingkungan yang memungkinkan dalam kerangka teori Debbie Roberts (2016) mengacu pada keberadaan kondisi struktural, kebijakan, sumber daya, dan mekanisme kelembagaan yang mendukung berlangsungnya kolaborasi secara efektif. Dalam konteks Kabupaten Bone, keberadaan *enabling environment* menjadi faktor fundamental yang menentukan keberhasilan tata kelola kolaboratif dalam percepatan penurunan stunting.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bone memiliki struktur kelembagaan dan regulasi yang cukup kuat sebagai fondasi bagi kolaborasi multi sektor. Pemerintah daerah menetapkan Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting yang menjadi dasar hukum pelaksanaan aksi kolaboratif lintas sektor. Regulasi ini diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 188 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), yang menegaskan pembagian peran antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah desa, dan lembaga mitra. Struktur kelembagaan ini memfasilitasi koordinasi dan integrasi program intervensi spesifik dan sensitif di seluruh tingkatan pemerintahan.

Dari sisi dukungan data, Kabupaten Bone telah mengintegrasikan dua sistem utama yaitu SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) dan e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Sistem e-PPGBM berperan penting dalam memastikan validitas dan pembaruan data secara real time, sehingga intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Data ini juga menjadi acuan dalam rapat evaluasi triwulan TPPS, di mana hasil analisis dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dukungan data yang kuat menciptakan lingkungan kebijakan berdasarkan bukti (*evidence-based policy*), yang menurut (Emerson et al., 2012), merupakan karakteristik utama tata kelola kolaboratif yang efektif.

Lingkungan yang memungkinkan juga tercermin pada adanya komitmen politik dari pimpinan daerah. Bupati Bone secara aktif terlibat dalam pertemuan koordinasi dan kampanye publik, yang menunjukkan bentuk kepemimpinan partisipatif. Komitmen ini berdampak pada peningkatan alokasi anggaran daerah untuk kegiatan percepatan penurunan stunting. Berdasarkan dokumen APBD 2024, anggaran lintas sektor untuk kegiatan konvergensi stunting meningkat sebesar 18% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya prioritas kebijakan yang kuat, sesuai dengan rekomendasi Bappenas (2023) tentang perlunya dukungan fiskal dalam implementasi program gizi terpadu.

Selain faktor kelembagaan dan kebijakan, *enabling environment* juga diperkuat dengan dukungan sosial masyarakat. Peran lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Posyandu, dan Forum Anak menjadi elemen penting dalam memperkuat kolaborasi. Kader-kader ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan edukasi gizi, kesehatan ibu anak, dan pentingnya sanitasi. Dukungan ini tidak hanya memperluas jangkauan program, tetapi juga membangun kepercayaan di tingkat akar rumput.

Menurut Roberts, keberadaan lingkungan yang memungkinkan akan memperkuat variabel lain seperti *trust* dan *mutuality*, karena menyediakan ruang

dan sumber daya yang adil bagi semua pihak untuk berpartisipasi. Dalam kasus Kabupaten Bone, keberadaan regulasi yang jelas, koordinasi kelembagaan yang baik, data yang transparan, serta dukungan politik yang konsisten membentuk ekosistem kolaborasi yang produktif. Dengan demikian, *enabling environment* di Kabupaten Bone dapat dikategorikan efektif karena memenuhi empat indikator utama: adanya kerangka hukum, kepemimpinan institusional, dukungan data dan anggaran, serta keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan.

Kepercayaan (Trust)

Dalam teori efektivitas kolaborasi Debbie Roberts (2016), *trust* atau kepercayaan merupakan fondasi paling krusial bagi keberlangsungan kerja sama lintas sektor. Kepercayaan menciptakan rasa aman, keterbukaan, dan kesediaan untuk berbagi informasi serta tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks tata kelola kolaboratif di Kabupaten Bone, tingkat kepercayaan antar aktor sangat menentukan sejauh mana program percepatan penurunan stunting dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tahun 2020-2021, kepercayaan antar pemangku kepentingan masih rendah. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja dalam kerangka sektoral dan belum sepenuhnya memahami peran satu sama lain. Salah satu informan dari Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa "*awal-awal kami masih saling tunggu, belum percaya bahwa dinas lain bisa menjalankan kegiatan konvergensi dengan baik.*" Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang bersifat formal belum sepenuhnya menjelma menjadi kolaborasi yang didasari oleh rasa percaya.

Namun, seiring dengan pelaksanaan berbagai forum koordinasi dan evaluasi bersama, rasa saling percaya mulai terbentuk. Forum triwulanan TPPS yang difasilitasi oleh Bappeda berperan sebagai sarana membangun komunikasi terbuka antar OPD. Dalam forum tersebut, setiap sektor memiliki kesempatan untuk mempresentasikan capaian dan kendala, sementara sektor lain memberikan masukan konstruktif. Praktik transparansi ini berkontribusi terhadap peningkatan *trust* karena semua pihak merasa dihargai dan memiliki posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan.

Selain antar instansi, kepercayaan juga tumbuh antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Kesehatan melibatkan kader Posyandu dan PKK dalam kegiatan pemantauan status gizi, sementara pemerintah desa menyediakan dukungan logistik dan pendanaan dari Dana Desa. Kolaborasi ini memperkuat hubungan sosial di tingkat lokal. Faktor transparansi data juga berperan penting dalam membangun kepercayaan. Integrasi sistem *e-PPGBM* dengan data *SSGI* dapat membuat pelacakan perkembangan stunting secara terbuka dan berdasarkan bukti. Setiap desa dapat mengakses data anak stunting di wilayahnya, sehingga proses evaluasi menjadi lebih objektif. Praktik ini sesuai dengan prinsip *accountability* yang disebutkan oleh Emerson et al. (2012) sebagai salah satu pilar *collaborative governance*.

Selain faktor struktural, kepercayaan juga dibangun melalui hubungan interpersonal antar aktor kolaborasi. Pemimpin yang memiliki integritas tinggi

dan komunikasi yang empatik mampu menumbuhkan kepercayaan dari bawah. Dalam konteks Bone, figur Bupati dan Kepala Bappeda menjadi *trust builder* yang efektif. Bupati kerap menghadiri langsung forum lintas sektor dan memberikan ruang dialog terbuka antar OPD.

Roberts (2016) menegaskan bahwa *trust* adalah hasil dari interaksi berulang yang konsisten, bukan sekadar pernyataan formal. Kepercayaan yang tumbuh di Kabupaten Bone menjadi energi sosial yang memperkuat kolaborasi. Dengan adanya rasa percaya, koordinasi menjadi lebih fleksibel, komunikasi lebih jujur, dan konflik dapat diminimalkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kepercayaan tinggi antar aktor kolaboratif seperti Kecamatan Palakka dan Tellu Siattinge mengalami penurunan prevalensi stunting lebih cepat dibandingkan wilayah lain.

Dengan demikian, *trust* telah berkembang dari hubungan fungsional menjadi hubungan emosional dan profesional yang menopang keberhasilan tata kelola kolaboratif di Kabupaten Bone. Kepercayaan yang dibangun melalui transparansi, komunikasi terbuka, dan komitmen bersama menjadikan seluruh pihak memiliki rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program. Kepercayaan ini bukan hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan upaya percepatan penurunan stunting di masa depan.

Karakteristik Pribadi Tertentu (Specific Personal Characteristics)

Dalam model efektivitas kolaborasi Debbie Roberts (2016), variabel *specific personal characteristics* menekankan pentingnya kualitas individu yang terlibat dalam proses kolaborasi. Karakter personal seperti integritas, kemampuan komunikasi, empati, kepemimpinan inklusif, serta komitmen terhadap tujuan bersama merupakan faktor non struktural yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan kolaborasi lintas sektor. Dalam konteks tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bone, karakteristik pribadi para aktor kunci terbukti menjadi elemen penting yang menentukan efektivitas kolaborasi multi sektor untuk percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari berbagai instansi, figur Bupati Bone menonjol sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi terhadap isu gizi dan kesehatan masyarakat. Kepemimpinan yang ditunjukkan bersifat *transformational leadership*, di mana ia mampu menggerakkan berbagai sektor untuk berpartisipasi aktif dalam upaya konvergensi. Selain itu, karakteristik pribadi yang menonjol juga terlihat pada pejabat teknis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, BKKBN. Mereka menunjukkan kemampuan koordinatif yang kuat serta keterampilan komunikasi yang baik, yang mempermudah proses integrasi program antar sektor. Dalam teori Roberts (2016), kemampuan komunikasi dan keterbukaan terhadap perspektif pihak lain menjadi ciri penting individu yang efektif dalam kerja sama lintas sektor. Hal ini tampak dalam praktik rapat koordinasi TPPS di Bone, di mana setiap pimpinan OPD tidak hanya menyampaikan capaian sektoral, tetapi juga terbuka menerima koreksi dari sektor lain.

Kader-kader di tingkat desa juga menunjukkan karakter personal yang berpengaruh dalam keberhasilan kolaborasi. Kader Posyandu, PKK, memiliki

dedikasi tinggi, bekerja dengan empati, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Beberapa informan bahkan menyebutkan bahwa “*kader di sini tidak hanya bekerja karena tugas, tapi karena mereka merasa anak-anak di desanya adalah tanggung jawab bersama.*” Nilai kepedulian sosial seperti ini memperkuat dimensi *humanistic leadership* yang mendukung keberlanjutan program konvergensi.

Karakteristik pribadi tertentu juga tampak dalam sikap saling menghargai dan rendah hati antar aktor. Dalam forum TPPS, misalnya, perbedaan pandangan antar sektor tidak menimbulkan konflik, melainkan dijadikan bahan pembelajaran kolektif. Etika komunikasi yang inklusif menjadi penanda bahwa setiap aktor telah memiliki kedewasaan kolaboratif (*collaborative maturity*). Seperti dikemukakan oleh (Emerson et al., 2012), kedewasaan kolaboratif muncul ketika aktor-aktor dalam jaringan memahami bahwa kerja sama membutuhkan kesetaraan dan saling ketergantungan, bukan dominasi.

Dengan demikian, karakteristik pribadi tertentu para aktor dalam kolaborasi di Kabupaten Bone berperan sebagai katalis sosial yang memperkuat dimensi struktural dan kelembagaan. Karakter seperti empati, integritas, komitmen, serta kemampuan komunikasi menjadi elemen tak terpisahkan dari efektivitas tata kelola kolaboratif. Sebagaimana ditegaskan Roberts (2016), tanpa individu yang memiliki nilai-nilai kolaboratif, institusi yang kuat sekalipun tidak akan mampu mewujudkan sinergi lintas sektor secara berkelanjutan.

Dalam konteks Bone, keberhasilan penurunan prevalensi stunting dari 25,3% pada tahun 2023 menjadi 21,9% pada tahun 2024 tidak hanya disebabkan oleh kebijakan dan dukungan sumber daya, tetapi juga oleh adanya aktor-aktor kunci dengan karakter pribadi yang kuat dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan kata lain, keberhasilan kolaborasi di Kabupaten Bone merupakan hasil dari sinergi antara sistem yang baik dan manusia-manusia yang memiliki nilai kemanusiaan tinggi. Inilah yang menjadikan model tata kelola Bone layak dijadikan rujukan bagi kabupaten lain dalam membangun kolaborasi multisektor yang efektif untuk menurunkan stunting di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola pemerintahan dalam kolaborasi multi sektor merupakan faktor kunci dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone. Berdasarkan kerangka teori efektivitas kolaborasi Debbie Roberts (2016), ditemukan bahwa lima dimensi utama yaitu *common purpose*, *mutuality*, *enabling environment*, *trust*, dan *specific personal characteristics*, berperan secara sinergis dalam menguatkan implementasi kebijakan konvergensi stunting dari tingkat kabupaten hingga desa. Pertama, *common purpose* berfungsi sebagai fondasi arah kebijakan. Bone Bebas Stunting 2025 berhasil menginternalisasi tanggung jawab bersama lintas sektor dan memperkuat komitmen kolektif dalam penyusunan serta pelaksanaan program. Kedua, *mutuality* mendorong hubungan timbal balik yang produktif antara pemerintah, masyarakat, menciptakan efisiensi sumber daya dan rasa kepemilikan bersama terhadap tujuan program. Ketiga, *enabling environment* membuktikan bahwa dukungan regulatif, kelembagaan, dan fiskal yang memadai

menjadi prasyarat bagi keberhasilan kolaborasi; hal ini diwujudkan melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020, SK Bupati Nomor 188 Tahun 2022, dan sistem data terpadu (SSGI dan e-PPGBM). Keempat, *trust* menjadi unsur sosial yang menjaga stabilitas kolaborasi; melalui forum TPPS dan keterbukaan data, pemerintah dan masyarakat membangun hubungan saling percaya yang memperkuat koordinasi. Kelima, *specific personal characteristics* menegaskan bahwa kepemimpinan yang visioner, empatik, dan partisipatif mampu menjadi katalis bagi efektivitas tata kelola kolaboratif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif tidak hanya ditentukan oleh struktur dan kebijakan formal, tetapi juga oleh kualitas interaksi sosial, nilai-nilai kemanusiaan, serta kapasitas kepemimpinan yang adaptif. Penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Bone dari 25,3% (2023) menjadi 21,9% (2024) merupakan bukti empiris dari model kolaborasi yang efektif, inklusif, dan berorientasi hasil. Adapun rekomendasi yang diberikan yaitu pemerintah daerah perlu memperkuat keberlanjutan model kolaboratif melalui tiga langkah strategis: (1) institusionalisasi forum TPPS di tingkat desa agar tidak bergantung pada figur kepemimpinan tertentu; (2) peningkatan kapasitas kader dan perangkat desa dalam manajemen data serta komunikasi lintas sektor; dan (3) integrasi indikator kepercayaan sosial dalam evaluasi kinerja program. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme insentif berbasis kinerja kolaboratif, bukan hanya pencapaian sektoral.

Referensi

- Andonova, L. B., & Faul, M. V. (2022). The Effectiveness of Partnerships: Theoretical Framework. In *Partnerships for Sustainability in Contemporary Global Governance: Pathways to Effectiveness* (pp. 23-53). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003148371-3>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bappenas. (2020). Strategi Nasional Percepatan pencegahan Anak Kerdil (Stunting).
- BKKBN. (2021). BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA. PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING INDONESIA TAHUN 2021-2024. www.peraturan.go.id
- BKKBN. (2023). Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
- Bone.id. (2025). Data Stunting 2024- AKSI 7 PENGUKURAN & PUBLIKASI STUNTING.
- Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan. (2023). Rencana Aksi Kegiatan 2022-2024.

-
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- John W Chraswell. (n.d.). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (8 C.E.). *Laporan Nasional RISKESDAS 2018*.
- Keputusan Bupati Bone. (2022). SK Tim PPS Bone Nomor 188 Th. 2022.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (Helen Salmon, Ed.; 3rd ed.). Sage Publication.
- Moleong, & Lexy J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2014). The stunting syndrome in developing countries. *Paediatrics and International Child Health*, 34(4), 250-265. <https://doi.org/10.1179/2046905514Y.0000000158>
- Research Institute (IFPRI), I. F. P. (2016). *Global Nutrition Report 2016 From Promise to Impact Ending Malnutrition by 2030*. <https://doi.org/10.2499/9780896295841>
- Roberts, D., van Wyk, R., & Dhanpat, N. (2016). *EXPLORING PRACTICES FOR EFFECTIVE COLLABORATION*. Annual Conference of the Southern African Institute of Management Scientists, ISBN: 978-0-620-71797-7.
- UNICEF, & WHO. (2017). *LEVELS AND TRENDS IN CHILD MALNUTRITION*.